

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2016. Tabel Perkembangan UMKM pada Periode 1997-2013. Dilihat pada 29 November 2019. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1322/tabel-perkembangan-umkm-pada-periode1997--2013.html>.
- Chang, William. 2014. Metodologi Penulisan Ilmiah. Jakarta: Erlangga
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Dilihat 20 Januari 2020. <https://undang--undang-nomor-36-tahun-2008>.
- Harun, Irmasari, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi. 2019. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 bagi UMKM di Kota Malang. E-JRA 08 [10].
- Kanwil DJP Sumatera Utara II. 2019.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Jakarta.
- _____. 2007. Undang Undang KUP. Dilihat 20 Januari 2020. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/28TAHUN2007UU.htm>
- _____. 2019. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilihat 20 Januari 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Dilihat 10 Januari 2020. www.depkep.go.id/data-umkm
- Khotmi, Herawati. 2016. Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan terhadap UMKM dan Penerimaan Negara (Studi Kasus pada CV. Lombi Senggigi Lombok Barat). Valid 13 [01]: 125-131.
- Muhyidin, Nurlina T dkk. 2017. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial. Jakarta: Salemba Empat
- Muhammad, M. 2019. Perencanaan Pembangunan. *Journal of Chemical Information and Modelling*. Doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Nugrahadi, E. W., Maipita, I., & Situmeang, C. (2020). *Dominant Socio-Economic Indicators on the Growth of Small-Scale Industrial Sector:*

Empirical Evidence with Principal Component Analysis. Revista Espacios, 41 (2).

Peptasari, Ardela Lita. (2015). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2). Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Juli 2018.

2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Juli 2013.

Razali, and Ferawati. 2019. “Kepemilikan Institusional Dan Transparansi Informasi Terhadap Penghindaran Pajak: Sebelum, Saat, Dan Setelah Tax Amnesty.” *Jurnal Ekonomi Perjuangan* 1 (2): 74–88.

Sarwono, H. A. 2015. Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm). *Bank Indonesia dan LPPI*, hal: 15.

Siregar, Syofian. 2014. Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Suliyono, Joko. 2011. 6 Hari Jago SPSS 17. Yogyakarta: Cakrawala.

Suryani, Wahyu, Maslichah, dan Junaidi. 2019. Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan. *E-JRA* 08 [02].

Susetyo, Budi. 2010. Statistika Untuk Analisis Data Penelitian: Dilengkapi Cara Perhitungan dengan SPSS dan MS Office Excel. Bandung: PT. Refika Aditama. Takdir, Deddy, Mahmudin, dan Sudirman Zaid. 2015. *Kewirausahaan*. Yogyakarta: Wijana Mahadi Karya

Tjiali, Widya. 2015. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA* 03 [04]: 369-376

Wahdi, Nirsetyo dan Suratman. 2018. Efektifitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bagi UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Penghasilan pada KPP Pratama di Semarang. *Aset* 20 [01]: 37-45

Walfajri, Maizal. 2018. Jumlah Pelaku UMKM di 2018 diprediksi mencapai 58,97 Juta Orang. Dilihat 10 November 2019. <https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-pelaku-umkm-di-2018-diprediksi-mencapai-5897-juta-orang>